

TEROR NEGARA

Ariel Heryanto tentang Politik Pendidikan dan Batuk-Batuk Pagi

Setelah munculnya ribut-ribut di tempat dia mengajar, yakni Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Salatiga, Jawa Tengah, Dr. Ariel Heryanto dan sejumlah dosen "vokal" lain terpaksa *hengkang* dari universitas tersebut. Maka, sejak pertengahan 1996, dia mengajar di Universitas Nasional Singapura. Setelah empat tahun *nongkrong* sebagai dosen dan antropolog kawakan di Negeri Singa tersebut ia pun *hengkang* lagi, kali ini ke Benua Kanguru, Australia. Kini ia mengajar di Melbourne Institute of Asian Languages and Societies, Universitas Melbourne, Australia. Pada bulan Mei 2000, kumpulan tulisannya diterbitkan dengan judul *Perluwanan dalam Kepatuhan* (Bandung: Mizan).

BAGIAN 1 POLITIK PENDIDIKAN

Dalam bagian pertama wawancara yang diadakan pada tanggal 7 Juni 1995 ini, Ariel Heryanto bicara tentang politik pendidikan. Dia menekankan pentingnya pendidikan luar sekolah. Menurutnya, "Pendidikan formal sukar diharapkan untuk

membantu proses pencerahan, karena di dalamnya ada banyak sekali represi. Tetapi dalam bermasyarakat ada pendidikan di luar sekolah. Misalnya melalui media massa, e-mail, agama, dan sebagainya yang kemudian juga mempengaruhi lembaga-lembaga pendidikan formal. Jadi sumber pendidikan luar sekolah itu datangnya dari mana-mana, dari luar lembaga formal itu sendiri." Ia tidak banyak berharap dari pendidikan formal. Alasannya, karena "hampir semua pendidikan formal itu tujuannya untuk melayani kepentingan modal."

Bagi Ariel, yang mau ngerti pendidikan harus paham juga politik. "Kalau terjadi perubahan dalam undang-undang pendidikan, terjadi juga perubahan dalam sektor-sektor lain," katanya. Dalam semua perubahan itu, ia percaya, ada dua faktor utama yang amat berpengaruh: "Satu militer, dan satu lagi modal." "Dan kalau dikutak-katik lagi," tambahnya, "semua berhubungan dengan apa yang terjadi pada tahun 1965." Maksudnya? "Tahun 1965 itu merupakan titik balik kemenangan modal dan bedil. Dengan demikian, mau ngomong apa pun, pendidikan, kesenian, agama dan sebagainya, kita harus paham apa yang terjadi pada tahun 1965."

Kapitalisme dan Pendidikan

T: Bung Ariel, dengan berkembangnya konglomerasi atau kapitalisme, menurut *ente* apa persoalan utama yang kita hadapi dalam sektor pendidikan?

J: Yang jelas aku lihat adalah proses depolitisasi. Sebelum berkembangnya kapitalisme, proses depolitisasi kelihatan gagap,

kikuk. Seperti represi dengan NKK-BKK* yang sifatnya menindas, melarang. Memakai istilah Foucault "*power by negation*," sekarang kekuatan pasar itu bisa menawarkan sesuatu, tidak hanya bisa melarang. Orang sadar bahwa gelar-gelar itu bisa berharga di pasar. Jadi proses depolitisasi kemudian terjadi bukan oleh sejumlah larangan lagi. Sekarang, orang semakin malas berpolitik karena banyak tawaran lain yang lebih memikat.

Tentu saja itu terjadi bukan tanpa akibat sampingan. Kritik orang pada kapitalisme juga muncul dalam sejumlah gerakan mahasiswa. Analisa kritis seringkali muncul di universitas yang elite, disponsori oleh modal. Ironisnya *di situ*. Buat aku, kapitalisme itu punya kecendrungan yang saling bertentangan. Jelas dia tidak diciptakan untuk melahirkan lawannya. Tetapi dalam prakteknya, itu yang terjadi. Banyak anak dan keluarga kaya yang kemudian jadi kritis. Dan banyak proses pencerahan justru datang dari mereka yang mungkin melakukannya karena kondisi ekonominya memungkinkan. Perintis kemerdekaan kita kan juga orang-orang elite pada zamannya.

T: Bagaimana peran pendidikan sendiri dalam proses pencerahan?

J: Pendidikan formal sukar diharapkan untuk memahami proses pencerahan, karena di dalamnya ada banyak sekali represi. Tetapi dalam bermasyarakat ada pendidikan di luar

*Normalisasi Kehidupan Kampus-Badan Koordinasi Kampus.

sekolah. Misalnya melalui media massa, e-mail, agama, dan sebagainya yang kemudian juga mempengaruhi lembaga-lembaga pendidikan formal. Jadi sumber pendidikan luar sekolah itu datangnya dari mana-mana, dari luar lembaga formal itu sendiri. Tetapi mereka butuh tempat berpijak. Lalu dapat tempat di LSM, di universitas dan lain-lain.

Contoh lain, teman-teman yang belajar di luar negeri. Mereka hidup dalam masyarakat non-Orde Baru Indonesia. Mereka mendapat pengalaman keluar masuk supermarket, melihat perdebatan di TV, hukum yang ditaati, dan seterusnya. Itu juga semacam pendidikan luar sekolah yang mungkin bisa membuat mereka berpikir ulang tentang Orde Baru. Tentu tidak semua. Bahkan sebagian besar mungkin tidak berpikir lagi.

T: Bagaimana hubungannya dengan pengertian tentang "intelektual organik"?

J: Intelektual organik itu, yang aku tahu pemahamannya begini: *Nggak* ada intelektual yang netral; mereka adalah bagian dan suatu proses terbentuknya kelas. Di Indonesia yang namanya intelektual ya kelompok elite itu, yang sebenarnya organik dengan kapitalisme. Buat aku, kapitalisme juga merupakan kekuatan pencerahan, sekaligus *di situ* juga "setan"-nya. Kapitalisme memungkinkan mahasiswa untuk bisa duduk berjam-jam baca buku, atau berdiskusi. Mereka sempat untuk membuat *critical reflection*. Walaupun untuk kesempatan yang didapat sekelompok mahasiswa itu ada orang lain yang harus membayar. Ada anak-anak seumuran mereka yang sedang rebutan di terminal bus, diuber-uber Satpam, Polisi,

Tibum [petugas ketertiban umum]. Banyak yang jadi TKW [tenaga kerja wanita]. Usianya sama dengan yang jadi mahasiswa.

T: Apakah *critical reflection* ini yang menumbuhkan pemikiran yang kritis?

J: Minimal itu. Kemudian mereka sadar bahwa pemikiran yang kritis itu bertabrakan dengan kondisi nyata. Misalnya dalam kasus UKSW. Orang merasa makin lama makin pintar, tetapi tetap diperlakukan sebagai buruh, bukan sebagai intelektual. *Nggak* penting kamu baca apa. Yang penting, bisa *nggak* kamu mendatangkan sekian mahasiswa per tahun? Bisa *nggak* cari proyek untuk fakultas? Dulu aku dengar keluhan seperti ini dari teman-teman dosen di Australia atau di AS. Sekarang di Indonesia makin lama makin terasa. Dan kalau kemudian pemerasannya jadi sadis, habis-habisan, betul-betul dianggap buruh, orang jadi marah.

T: Bagaimana dengan pendidikan di kalangan bawah dan pinggiran, di antara buruh, petani, atau pedanggang asongan? Apakah memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dalam proses pencerahan?

J: Aku yakin. Yang legendaris ya Marsinah itu. Ini orang berjam-jam di rumahnya *ngumpulin* kliping koran, belajar tentang sidang pengadilan, berdiskusi. Sampai dia tahu bahwa dia bisa menggugat. Tahu ceritanya?

T: Belum. Bagaimana?

J: Mulanya ada demonstrasi buruh. Kemudian mereka diajak berdialog. Di situ ada pimpinan perusahaan, aparat keamanan dan wakil buruh. Dan mereka sampai pada kesepakatan, yang salah satu poinnya: tidak ada PHK, tidak ada pemogokan lagi. Pokoknya mereka bisa berunding dan bersepakat. Tapi beberapa hari kemudian mereka dipanggil, diminta mengundurkan diri. Marsinah marah sekali "Kalau tidak dicabut, akan saya gugat ke pengadilan!" katanya. Kabarnya dia punya saudara di pengadilan. Lalu dia belajar sendiri dari klipping-kliping koran itu. Seterusnya kamu pasti sudah tahu.

T: Bagaimana munculnya proses pemberdayaan itu, sehingga dia merasa bisa berbuat sesuatu?

J: Peranan media besar sekali. Mungkin Mas Gunawan Mohamad betul. Dia pernah bilang, "Kalau mau disederhanakan: ini ada anak desa jadi buruh, yang kalau *dikampleng* [di-tempeleng] itu sudah dianggap biasa. Yang *ngampleng nggak* pernah *ngebayang* bahwa kasus ini bakal sampai ke Jenewa. Tapi kenapa bisa sampai ke sana? Karena media." Jadi media memang menumbuhkan iklim yang *empowering*. Kasus-kasus seperti itu bisa menjadi besar karena peranan media massa.

T: Apakah pendidikan yang bisa membantu pemberdayaan masyarakat itu kebanyakan terjadi di luar pendidikan yang formal, seperti melalui media tadi?

J: Memang. Makanya kalau kita bicara politik di Indonesia, jangan bicara tentang sidang DPR-MPR. Jangan bicara

tentang Pemilu. Begitu juga kalau bicara tentang pendidikan jangan hanya *ngomongin* yang di sekolah.

T: Bagaimana peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)?

J: LSM sekarang ini mengerjakan hal-hal yang pada tahun 1950-an dikerjakan oleh parpol. Misalnya buka kursus-kursus. Banyak sekali itu, mulai dari kursus penyadaran hukum di kalangan buruh sampai kursus bikin sumur dan menjahit.

T: Menurut *ente*, apa pelajaran paling penting yang bisa berguna untuk LSM?

J: Banyak dan susah merumuskannya. Misalnya menanamkan kesadaran bahwa kegiatan LSM adalah bagian dari apa yang kita sebut republik. Kesadaran bahwa *nggak* semua harus diminta dari penguasa. Juga kesadaran bahwa kita *nggak* berjuang sendirian. Kalau ada yang digebug, masih bisalah teriak-teriak di media massa. Mereka *nggak* sendirian. Minimal ada kesadaran itu. Bahwa orang tidak menang, itu soal lain lagi. Tapi kalau kalah, kalahnya *nggak* konyol dan juga *nggak* kalah sendirian. Banyak orang lain yang kalah bersama mereka. Punya kesadaran seperti itu akan menjadi pemberdayaan yang luar biasa untuk masyarakat.

Antara Teori dan Praktek

T: Dalam sebuah seminar tentang pemberdayaan masyarakat, ada debat antara teori dan praktek. Bagaimana teori dan praktik itu bisa digabungkan?

J: Aku kira, persoalannya bukan teori versus praktek. Tapi teori macam apa, dan praktek yang macam apa. Seringkali, kalau orang berdebat mereka ambil contoh yang terjelek dari lawannya. Yang senang praktek ambil contoh teori yang jelek-jelek. Dan itu memang ada, banyak sekali. Yang suka ber-teori ambil contoh jelek dari praktek. Padahal sebenarnya ada teori yang dekat dengan praktek dan sebaliknya juga. Contohnya, seperti apa yang pernah kita bicarakan tentang *civil society*. Setahuku, kalau acuannya adalah pikiran Gramsci, itu teori yang dia karang setelah lama jadi aktivis. Jelas lahirnya dari praktek. Jadi aneh kalau kemudian orang bicara *civil society* seperti tidak ada hubungan dengan praktek. Lihat juga *women's movement*. Dulunya itu gerakan yang sangat tidak *scholarly*. Tapi kemudian diambil oleh para ilmuwan.

Dalam kesadaran berketuhanan juga begitu. Setelah kita ngobrol berbusa-busa tentang macam-macam teori yang tinggi-tinggi seringkali mahasiswa tanya, "Lalu kita mesti *gimana*?" Biasanya aku bilang, "Kalau kamu orang Kristen, semua jawabannya sudah ada di Alkitab. Ada ayat-ayat yang bilang: 'Kalau kamu memberi pada orang yang sengsara, memberi baju pada yang telanjang, memberi makan pada yang kelaparan, sebenarnya kamu memberi untuk Aku.' Lalu orang tanya, 'Tapi kami kan tidak pernah melihat Engkau kelaparan, sakit, dan sebagainya ...?'" Nah, itu kan sama dengan kalau sekarang kita bilang, "Kami kan tidak pernah melihat Engkau di-phk, *nggak* lihat Engkau digusur, dan sebagainya ..." Menerjemahkan itu kan *nggak* susah?

Aku kira intelektual itu tidak selalu memikirkan hal-hal yang orisinal. Seringkali sebenarnya mereka hanya memahami kembali, menghidupkan hal-hal yang sebenarnya sudah lama

ada. Teori atau teologi yang rumit-rumit itu bisa diterjemahkan menjadi hal-hal praktis yang bisa kita kerjakan. Dan aku kira, dalam agama-agama lain juga begitu.

Kita juga harus sadar bahwa tidak semua hal harus dirancang rapih, tuntas, sebelum kita melakukan sesuatu. Dalam banyak hal kita *nggak* bisa menunggu sampai teorinya rampung. Contohnya, kontroversi pembangunan waduk Kedungombo, atau kasus Timor Timur itu. Kalau kita tanya ke teman-teman dari Timtim, "Kalau kamu yang memerintah sekarang, *gimana*? Siapa presiden kamu, apa programnya?" Mereka *nggak* bisa jawab. Begitu juga waktu kita baru merdeka. Siapa yang tahu jawaban pertanyaan seperti itu? Lalu kalau *nggak* bisa jawab, apa itu berarti mereka sekarang, atau kita dulu, *nggak* usah berjuang?

Intelektual dan Polemik Kebudayaan

T: Kalau kita kembali pada awal abad ini, ada mitos bahwa Politik Etika itu melahirkan lapisan intelektual pertama di Nusantara. Apakah sebelum itu memang belum ada? Bagaimana kita melihat intelektual seperti Ronggowarsito, misalnya? Apakah mereka bisa disebut intelektual? Dan apa bedanya dengan intelektual produk Politik Etika?

J: Kalau memakai pengertian intelektual yang lebih luas, mereka jelas ada sebelum Politik Etika. Karena selalu ada profesi yang kerja utamanya itu mikir. Sebelumnya, di kraton-kraton memang ada orang yang kerja utamanya banyak mikir dan nulis. Semua orang tentu bisa mikir, tapi tidak semua yang bisa mikir lalu kita sebut intelektual. Seperti dikatakan

Gramsci, "Bawa kamu bisa masak tidak berarti kamu koki." Nah, ada satu jaman di mana terjadi semacam profesionalisasi di bidang itu. Yang membuat pengertian tentang intelektual itu berubah adalah karena munculnya cara produksi yang baru. Lalu kita butuh penjelasan yang baru. Intelektual abad ke-20 menjelaskan gejala-gejala abad ke-20 dengan cara yang berbeda.

T: Bagaimana pendapat *ente* tentang Polemik Kebudayaan tahun 1930-an itu? Gimana *ente* melihat perdebatan antara Sutan Takdir, Sutomo, Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara, dan kawan-kawan itu?

J: Sekarang Polemik Kebudayaan seringkali disederhanakan menjadi Barat lawan Timur. Tapi waktu kami—aku dengan beberapa mahasiswa S-2—baca ulang Polemik Kebudayaan, itu menarik. Mereka yang berpolemik ini memang luar biasa. Bacaannya luas sekali.

T: Bagaimana pemahaman mereka waktu itu kalau dilihat dalam konteks modernitas?

J: Sebagian sudah didiskusikan. Antara lain oleh Ben Anderson dalam bukunya *Imagined Communities*. Misalnya kesadaran tentang waktu, *a sense of history*. Munculnya kesadaran tentang perspektif global, rasionalitas, relativisme, analisa sebab-akibat, mitos baru tentang obyektivitas, *analytical thinking*, dan sebagainya. Kesadaran akan adanya semacam hukum mengenai perubahan dalam masyarakat. Mengapa masyarakat itu berubah? Itu tidak kebetulan saja, tapi ada hukumnya.

Masyarakat bukan hanya berubah, tetapi berubah menurut suatu gerak tertentu.

Kesadaran itu berpengaruh dalam melihat bagaimana peradaban berevolusi, yang kemudian memunculkan sejumlah harapan. Kalau kesadaran sejarah kita seperti itu, maka yang kita cita-citakan juga lain. Lalu aktivitasnya jadi lain juga. Dan itu menurun. Pembagian waktu juga lain, yang dipelajari jadi lain, dan seterusnya. Kita berharap banyak pada perbaikan di masa depan, pada *progress*. Dan menaruh harapan itu pada cara-cara yang rasional, pengorganisasian yang non-personal, dan sebagainya.

Kalau sekarang orang kira Polemik Kebudayaan adalah perdebatan Barat versus Timur. Aku kira itu *nggak bener*. Di zaman Orde Baru segala yang jelek dicap Barat. Padahal kalau kita baca Polemik Kebudayaan, semua yang berdebat punya pengetahuan luar biasa tentang Barat. Baik Ki Hajar maupun Sanusi Pane baca semua itu. Mungkin lebih banyak baca dari-pada mereka yang sekarang kita sebut budayawan. Dan semuanya *nggak sekonyong-konyong* menolak Barat. Buat mereka persoalannya, "Barat itu mau *diapain*?" Itu yang mereka perdebatkan, bukan masalah Barat atau Timur.

1965: Kemenangan Modal dan Bedil

T: Ki Hajar dan Taman Siswa-nya itu pernah jalan baik sampai tahun 1960-an. Tapi sekarang cita-cita itu bisa dibilang habis. Kenapa?

J: Secara gampang-gampangan, aku akan jawab, hampir dalam semua bidang banyak yang habis. Kita sering mendis-

kusikan sektor pendidikan seakan-akan itu sektor yang berdiri sendiri, lepas dari sektor-sektor yang lain. Padahal kalau terjadi perubahan dalam undang-undang pendidikan, terjadi juga perubahan dalam sektor-sektor lain. Dan banyak hal yang ternyata saling berkaitan, bukan hanya karena menteri baru punya kebijakan baru. Dan dalam semua perubahan itu ada kekuatan luar yang sangat berpengaruh. Menurut aku, satu militer dan satu lagi modal. Makanya kalau kita mau kutak-katik pendidikan, harus paham juga politik. Dan kalau dikutak-katik lagi, semua berhubungan dengan apa yang terjadi pada tahun 1965.

T: *Gimana* penjelasannya?

J: Tahun 1965 itu titik balik kemenangan modal dan bedil tadi. Dengan demikian, mau ngomong apa pun—pendidikan, kesenian, agama, dan sebagainya—kita harus paham apa yang terjadi pada tahun 1965.

T: *Gimana* peran modal dan bedil di tahun 1965 itu?

J: Keduanya tidak suka pada gerakan kerakyatan yang kekiri-kirian. Apakah itu Partai Komunis Indonesia (PKI), kelompok nasionalis, atau Bung Karno. Dan itu juga harus kita lihat dalam konteks politik internasional waktu itu. Tidak bisa kita lihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.

T: Lalau apa pengaruhnya yang *ente* lihat sekarang?

J: Pertama, terjadi ketakutan. Atau pakai istilah yang lebih bagus, terjadi pendisiplinan. Misalnya orang bisa duduk ber-

tahun-tahun, dilatih untuk jadi patuh. Kepatuhan itu dibutuhkan oleh industri yang butuh buruh yang bisa patuh. Bagi mereka, yang menjengkelkan adalah kalau ada yang tidak patuh. Padahal itu selalu ada.

T: Mungkin *nggak* dalam kondisi itu muncul pendidikan yang melayani masyarakat?

J: Sekarang sedang tumbuh. Karena apa? Aku kira, baik modal maupun bedil *nggak* bisa 100% mendisiplinkan seluruh lapisan dalam masyarakat. Selalu ada lobang-lobangnya. Ada kebocoran yang lalu dimasuki orang-orang yang makin lama makin *nggak* tahan dalam pendisiplinan untuk tujuan itu.

T: Bagaimana *ente* melihat pendidikan di negara-negara tetangga? Negara mana yang pendidikannya diarahkan untuk melayani masyarakat?

J: Aku *nggak* tahu banyak. Yang aku tahu, hampir semua pendidikan formal itu tujuannya untuk melayani kepentingan modal. Aku kira, sebagai contoh, pendidikan di Amerika adalah perwujudan dari NKK-BKK itu. Orang-orang sekolah yang baik, selesai belajar lalu santai, nonton TV. Liburan di pakai untuk piknik, mancing.

T: Bagaimana dengan di Vietnam atau Filipina?

J: Vietnam aku *nggak* tahu. Filipina menarik karena kesadaran sosialnya memang tinggi. Kenapa? Aku *nggak* tahu. Tapi, jangan-jangan Indonesia di tahun 1950-an juga begitu?

Mungkin kita harus belajar lagi, kenapa masyarakat dalam negara kita sendiri itu lain pada zaman yang lain.

T: Mengapa dalam diri orang Indonesia sering muncul sikap patriotik yang sempit, yang membuat kita tidak bisa melihat diri sendiri dalam konteks kemanusiaan yang umum? Misalnya dalam kasus Timor Timur yang sering muncul di jaringan internet. Kita bisa setuju dengan konsep-konsep kemanusiaan yang umum seperti demokrasi, hak asasi, dan sebagainya, tapi ketika tahu ada pembunuhan di Timtim orang bilang, "Ya, mereka bukan orang Indonesia." Dalam debat-debat di jaringan internet kami juga susah untuk bersympati pada perjuangan Orang Hitam di Amerika, atau orang Afrika, Amerika Latin, dan sebagainya. Menurut *ente* kenapa?

J: Sekarang memang begitu. Tapi kalau kita baca lagi Polemik Kebudayaan tahun 1930-an itu, kita tahu begitu kosmopolitannya mereka yang berdebat. Kenapa sekarang jadi menyempit? Jangan-jangan itu akibat Peristiwa '65 juga. Dalam sejumlah definisi tentang fasisme, ada yang bilang nasionalisme itu mesti kuat sekali. Karena, itu sumber mobilisasi emosi. Karena orang tumbuh dalam ketakutan, lalu muncul semacam kebutuhan untuk membuktikan bahwa "saya loyal." Aku duga, kalau Peristiwa '65 itu bisa kita atasi, artinya dijelaskan, dibeberkan, dikonfrontasikan, dan seterusnya, mungkin sikap patriotik yang sempit itu bisa luntur juga. Memang bisa sakit kalau kita tahu ada orang yang baik ternyata ada jeleknya, atau orang yang pernah bener ternyata sering salah juga dan sebagainya. Tapi lalu kita akan sadar bahwa bangsa kita *nggak* beda dengan bangsa-bangsa lain.

BAGIAN 2: TERORISME NEGARA DAN BANGKITNYA GENERASI BARU

Dalam bagian kedua wawancara yang diadakan pada tanggal 6 Maret 1997 berikut ini Ariel bicara tentang terorisme negara. Antara lain dia bilang, "Kekerasan politik dan teror negara terjadi di mana-mana. Yang rajin mencatat—tanpa beban analisa—adalah wartawan dan lembaga hak asasi manusia. Mungkin juga seniman. Lingkungan ilmu-ilmu sosial sangat ketinggalan memahami gejala itu."

Tentang Pembunuhan Massal '65 ia katakan, "Tanpa mempelajari soal itu, sulit sekali menjelaskan rahasia awetnya pemerintahan, sulit sekali menjelaskan watak, keistimewaan, dan kelemahan 'oposisi' yang diproduksikan oleh masyarakat dan era Orde Baru."

Dia mencatat munculnya generasi baru. "Keadaan mulai berubah dengan datangnya generasi baru yang lebih segar ke bumi mayapada," katanya. "Mereka punya mimpi dan geopolik kejiwaan tersendiri." Menurut Bung Ariel, "Generasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) *kayaknya* merupakan awal kokok ayam di ufuk fajar. Kalau bukan kokok ya batuk-batuk pagi begitulah."

Kisah Paling Hit

T: Dalam wawancara sebelumnya *ente* bilang, "Tahun '65 itu merupakan titik balik kemenangan modal dan bedil. Dengan demikian, mau ngomong apa pun—pendidikan, kesenian, agama dan sebagainya—kita harus paham apa yang terjadi

pada tahun 1965." *Gimana ente* memahami bayangan yang ada di masyarakat sekarang tentang Pembunuhan Massal '65 itu?

J: Bayangan itu tidak sepenuhnya dibikin sepihak dan searah oleh penguasa militer dengan sengaja dan perhitungan cermat. Yang terjadi mungkin beberapa proses reproduksi teror dan trauma sekaligus, tumpang-tindih *nggak* keruan. Dari saat ke saat, kisah-kisah itu diedit kembali. Di sana-sini ditambah bumbu baru. Unsur yang kurang enak dibuang. Jadi pengertian "reproduksi" bukanlah sebuah kerjaan mekanis mengulang-ulang, tapi sebuah kesibukan yang aktif, selektif, dan kreatif. Lalu dicampur unsur coba-coba, yang kadang-kadang ngawur.

T: Lha *gimana tuh* kejadiannya hingga tercipta bayangan menghantui itu—sesuatu yang seolah ada tapi ngancam terus—kalau *ndak* sepenuhnya dibikin sepihak dan searah gitu, demi kenyamanan dan stabilitas yang bersangkutan?

J: Ada banyak pejabat sipil dan militer yang memang *bener-bener* takut pada apa yang sudah terjadi pada masa sebelum banjir darah '65, dan *nggak pengen* mengulangi masa itu lagi. Mereka *nggak* mengada-ada—dalam arti menipu orang lain—tentang ketakutan mereka pada bahaya komunis. Ada banyak orang (pejabat dan rakyat biasa) yang dulu terlibat (termasuk menonton) dalam pembunuhan massal. Sebabnya berbeda-beda. Ada yang karena naif, spontan, membela diri, mengikuti desakan, terhanyut arus massa, takut, atau benci pada PKI.

Tapi kemudian di masa "stabilitas politik dan keamanan yang mantap" pengalaman masa lalu itu berubah menjadi renungan dan kenangan yang mengerikan. Hantu ketakutan plus *nyesal* plus trauma campur aduk mencekami sisa hidup bertahun-tahun. Dari saat ke saat ingatan yang mengerikan itu timbul atau mengigau kembali dan harus dijinakkan. Mungkin mirip trauma pengalaman tentara Amerika yang pulang dari Perang Vietnam.

Banyak birokrat—sipil maupun militer, negeri maupun swasta, khususnya pada tingkat menengah—yang gemar teriak-teriak "Awas ada PKI" bukan karena mereka benci PKI. Dulu kita dengan gampang mencurigai mereka ini cuma ingin menghantam musuh dengan stigma yang jitu. Tapi semakin lama semakin jelas bahwa kasusnya *nggak* selalu begitu. Bukan selalu karena mereka mau menghantam musuh, tetapi semata-mata karena (a) mereka merasa berkewajiban bertindak ekstra tegas, ekstra peka, dan ekstra waspada bin ekstra militan terhadap apa saja yang kelihatannya seakan-akan berkaitan dengan komunis. Dan (b) mereka *nggak* pernah tahu *kayak* apa sebenarnya yang dinamakan komunis itu dan apa yang bukan.

Mereka pada dasarnya ekstra takut kalau-kalau nanti apa yang *nggak* jelas itu ternyata PKI *beneran*, dan ternyata mereka tidak menindasnya sampai mampus, tahu-tahu sudah terlambat, begitulah mereka diindoktrinasi atasan. Dengan kata lain mereka sebenarnya *nggak* terlalu peduli dan tidak terlalu berurusan dengan bahaya PKI. Mereka cuma mencoba mempertahankan karier di zaman yang serba *nggak* jelas. Caranya dengan bertindak sesuai "petunjuk bapak."

Kalau petunjuknya *nggak* jelas, ya mereka harus cari

kejelasan sendiri di lapangan dengan tabrak sana tabrak sini. Untungnya bagi mereka tabrak sana-tabrak sini—tuduh sana tuduh sini, hajar sana-hajar sini—itu tidak akan menimbulkan risiko "ganti rugi" bila ternyata yang ditabrak bukan Komunis. Harga rakyat sudah dipatok terlalu murah. Pengadilan *nggak* jalan. Nuntut ganti rugi sama dengan cari penyakit baru.

Akibat dari semua itu, hikayat "bahaya PKI" menjadi kisah paling *hit* di Indonesia selama 30 tahun. Ia berada di ubun-ubun mimpi dan fantasi banyak orang sampai dasar sumur kejiwaan yang terdalam. Ia menjadi semacam induk yang beranak-pinak menjadi berbagai kisah, film, gosip, cerpen, formulir litsus [penelitian khusus], debat di koran dan seminar, sidang pengadilan. Anak-anak kisah ini kemudian melahirkan cucu-cucu cerita. Yang paling belakangan bertema OTB [organisasi tanpa bentuk] dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Jadi bukan cuma pemutaran film *Pengkhianatan G-30-S/PKI* setiap tanggal 30 September di televisi itu. Bukan cuma yang diproduksi dan reproduksi pemerintah.

Keadaan mulai berubah dengan datangnya generasi baru yang lebih segar ke bumi mayapada. Mereka punya mimpi dan gejolak kejiwaan tersendiri. Kisah Nintendo, penyanyi Madonna, Susi Susanti, Michael Jordan, Liga Dunhill, Iwan Fals, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), atau Sailor Moon jauh lebih menarik ketimbang hikayat G-30-S/PKI.

Sebelum itu ada generasi transisi. Mereka galak beroposisi pada sepak terjang Orde Baru, tapi masih terjerat retorika Orde Baru. Mereka marah bila Sukarno dijelek-jelekan. Tapi ukuran bagus dan jelek yang ada di benak mereka adalah ukuran yang dibikin Orde Baru. Begitulah, ketika Sukarno

dituduh bersympati pada Komunis atau suka Marxism, banyak anak muda penggemar Sukarno yang marah. Karena menurut mereka—persis seperti yang dikehendaki Orde Baru—Marxisme dan Komunisme itu jelek. Mereka *nggak* bisa bilang, "Kalau Sukarno Marxis, so what?"

T: *Bener-bener* takutnya para sang pejabat sipil maupun militer itu *gimana*? Kok sampai bisa *keder*-nya sama komunis sedemikian ekstrem? Apa emang komunis di Indonesia pernah melakukan teror dan membantai seperti yang terjadi di Aceh, Timika, Ujung Pandang, Tanjung Priok, Lampung, atau di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 itu? Ataukah komunis di Indonesia pernah tega *ngabisin* sepertiga penduduk negeri sebrang seperti di Timor Timur? Ataukah komunis pernah *ngancurin* rumah ibadah? Lalu membakar orang hidup-hidup di dalam gereja? Atau suka nyerbu markas dan *ngebantai* anggota partai lain? Apa sih yang PKI lakukan di masa itu hingga bisa menjadi momok ketakutan yang derajat kengeriannya bener-bener membebali kayak sekarang?

J: Wah, kayaknya kalian ini sudah terlalu lama tinggal di kampus negeri sebrang. Jadi kalian mempersoalkan kebenaran fakta: apa yang dilakukan atau tidak dilakukan PKI. Apa kalian kira politik di tanah air (atau di mana saja) berlangsung kayak begitu? Apa memangnya politikus peduli betul pada fakta sejarah? Dan mereka mau mati-matian berdebat soal kebenaran fakta sejarah, kayak anak sekolah atau mahasiswa yang bikin skripsi? *Come on!*

Jangankan PKI di zaman Perang Dingin yang konon menjadi partai komunis terbesar di seluruh jagad di luar Republik

Rakyat Cina (RRC) dan Uni Soviet—pantas bikin musuh-musuhnya grogi. PDI-nya Megawati itu jauh lebih lembek ketimbang PKI. Maaf, ini bukan bermaksud menghina PDI. Tapi yang mau aku bilang ialah bahwa, PDI yang Pancasilais dan sangat Orde Baru begitu saja sudah bisa ditakuti kayak begitu! Apalagi PKI. Jangan tanya apa alasan ketakutan mereka secara rasional. Susah jawabnya. Dan kalau pun dibikin-bikin alasan yang rasional, bisa-bisa kita malahan me-rasionalisasi-kan sepak terjang mereka lebih daripada yang sepanstasnya.

T: Kalau bukan cuma lantaran rasa benci dan ngeri sama PKI, apa yang membuat para pejabat militer dan sipil itu merasa wajib untuk takut dan ekstra hati-hati, sedang apa itu komunis saja mereka belum tentu ngerti? Tahunya setelah dijejali cerita sepihak yang *dikampanyein* sedemikian sistematik semenjak peristiwa Kolonel Untung mengumumkan adanya Dewan Jenderal.

J: Seperti *gue* bilang di atas: apa saja yang *nggak* jelas bisa bikin orang takut. Bisa, artinya *nggak* harus begitu. Emangnya kenapa Nazi begitu takut sama orang Yahudi?

Itu bagi yang pentolan. Bagi birokrat sipil dan militer di tingkat menengah ke bawah, yang di lapangan, yang paling mereka takutkan adalah kehilangan kerja, karier, bonus, promosi, hak sipil, bersih diri. Bukan PKI-nya. Yang mereka perjuangkan adalah keselamatan diri sendiri, keluarga, dan anak-cucu. Caranya ya mengikuti arus. Kalau arusnya anti-PKI mereka akan berlomba "lebih anti-PKI" dari yang lain. Kalau arusnya pro-PKI ya mereka akan "lebih pro-PKI." Ini

kan gejala universal. Di kampung-kampung Amerika strategi kayak begitu dibilang *politically correct*.

Ketakutan birokrat kelas menengah begini bisa dipahami, karena peluang maupun hak kerja dan pemecatan *zonder* prosedur yang jelas. Kalau atasan bilang di daerahnya atau kantornya atau kampungnya ada PKI, dia bisa disalahkan. Biasanya dia dituduh melindungi PKI. *Nggak* penting lagi apa benar yang dibilang atasan itu bahwa orang yang dituduh di kampungnya itu PKI. Pokoknya atasan bilang begitu.

Ini pernah terjadi di UKSW Salatiga. Ada seorang warga bangsa kita, *nggak* ikut-ikutan PKI. Tapi di tahun '60-an dia pernah kena tembakan nyasar anti-PKI. Itu dulu. Tahun 1980-an lain. Karena penguasa sipil dan militer di daerah tahu bahwa dia sebenarnya bukan PKI, maka mereka oke-oke saja membiarkan orang itu bekerja sebagai dosen di Salatiga. Ketika ada rame-rame perang saudara di kampus itu tahun 1990-an, orang itu mulai diteror lagi. Bukan oleh penguasa. Bukan oleh militer. Tapi oleh orang-orang swasta di UKSW sendiri! Bukan karena mereka benci sama PKI atau korban pelor nyasar anti-PKI itu. Ini hanya bagian dari cara merongrong perlawanan Kelompok Pro-Demokrasi (KPD) yang *ngelawan* rektor dan yayasan. Penguasa militer masih *diem aja*. Biarpun udah dikasih laporan, mereka cuek aja.

Tapi kemudian ada isyu OTB di politik Jakarta yang *nggak* ada kaitannya sama rame-rame di UKSW. Seorang pejabat tinggi militer di Jakarta digugat sejumlah LSM untuk membuktikan OTB ada beneran. Datanglah majalah *Gatra* bikin *cover story* tentang adanya OTB bin PKI di UKSW. Disengaja atau tidak, *cover story* ini menolong sang perwira yang hampir kehilangan muka. Dosen yang *nggak* bersalah itu digasak

habis-habisan, termasuk oleh penguasa UKSW yang ketakutan dituduh melindungi orang PKI. Kesimpulannya: inti persoalan bukan soal salah atau benar secara faktual, empirik atau objektif. Persoalannya *nggak* ada sangkut-paut sama PKI yang *beneran*. Prosesnya *nggak* selalu digarap dari puncak kekuasaan Orde Baru turun ke bawah.

Tanggung Jawab

T: *Ente ngomentarin* pula laku pejabat yang "tabrak sana tabrak sini—tuduh sana tuduh sini, hajar sana hajar sini—itu tidak akan menimbulkan risiko 'ganti rugi' bila ternyata yang di-tabrak bukan komunis. Harga rakyat sudah dipatok terlalu murah." Nah, soal "harga rakyat yang terlalu murah" ini pernah jadi perdebatan dengan teman-teman yang mengikuti wawancara mengenai Pembunuhan Massal '65. Semua tahu bahwa pernah terjadi pembunuhan ratusan ribu orang. Bagi mereka yang paling penting adalah ada orang-orang yang bertanggung jawab. Lalu berkembang dua sikap yang beda.

Pertama, sikap "Yang sudah, ya sudah. Bangsa kita harus saling memaafkan, lalu memandang ke depan." Yang kedua, sikap "Orang-orang dewasa harus bertanggung jawab atas kelakuannya. Kalau para pembunuh tidak diminta bertanggung jawab, maka itu akan menjadi pendidikan yang jelek bagi generasi selanjutnya." Lalu kami bahas pengalaman bangsa Jepang dan Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Juga apa yang terjadi di Korea beberapa waktu yang lalu.

Orang Jepang tidak pernah menghukum mereka yang berbuat kejam di negara-negara jajahannya. Bahkan kenyataan itu disembunyikan, tidak pernah menjadi pelajaran sejarah

bagi generasi selanjutnya. Lalu ketika negara-negara bekas jajahan menuntut—seperti kasus *jugun ianfu* (*comfort women*) itu—maka di Jepang generasi kini yang tak tahu tentang hal itu, jadi bengong. Kenapa? Karena generasi yang bersalah sudah mati sedang generasi sekarang tidak merasa bersalah. Sebaliknya di Jerman langsung menghukum mereka yang menjadi penjegal jutaan orang Yahudi. Lalu generasi selanjutnya diminta belajar dari peristiwa itu. Korea Selatan juga mengadili dua orang bekas presiden. Itu adalah pendidikan politik bagi rakyatnya. Pesannya jelas: yang bersalah harus dihukum, siapa pun juga dia.

Pendukung sikap kedua cenderung untuk mulai dengan mencari nama-nama orang yang betul-betul membunuh dengan kepala dingin. Bukan mereka yang terseret keadaan atau tertipu oleh propaganda, melainkan mereka yang betul-betul ikut merencanakan dan kemudian juga melaksanakan pembunuhan. Mungkin jumlah mereka ini cuma beberapa puluh orang saja. Lalu mereka ini perlu dibawa ke pengadilan. *Entah sendiri* bilang mereka yang betul bersalah ini mengalami "hantu ketakutan plus nyesal plus trauma campur aduk menghantui sisa hidupnya bertahun-tahun." Tapi itu soal pri badinya, bukan urusan bangsanya. Kalau memikirkan kepentingan bangsa, bagaimana? Apa ada alternatif lain?

J: Memang ini soal yang bisa diperdebatkan tanpa ada habisnya. Kalau menurut pikiranku sendiri: soal-soal yang pernah ditutup-tutupi itu mestinya dibongkar dan bisa diperdebatkan secara terbuka dan dewasa. Bukan cuma yang '65 aja. Bukan cuma yang di Timor Timur aja. Tapi semuanya. Juga kasus Tanjung Priok yang sudah mulai digugat orang.

Maksudnya bukan untuk membuka-buka luka lama. Ini berurusan langsung dengan persoalan masa sekarang dan selanjutnya. Harus dibedakan dua hal: (a) meneliti kasus-kasus kekerasan di masa lalu itu demi pemahaman sosok masyarakat Indonesia masa sekarang dan peluang-peluang serta hambatannya bagi perubahan di masa selanjutnya, dan (b) menetapkan sebuah kesepakatan tentang sikap/tanggapan/vonis yang pantas bagi yang bersalah atau pahala/kompensasi/ganti-rugi bagi yang berjasa atau jadi korban dari peristiwa yang sudah lewat.

Keduanya memang berkaitan, tapi tak perlu dicampur aduk. Yang diperdebatkan teman-teman dalam cerita kalian di atas kan yang (b). Sayang kalau gara-gara kita *nggak* bisa sepakat yang (b), maka yang (a) harus dibunuh. Atau sebaliknya: patut dipertanyakan bagaimana kita bisa buru-buru berdebat atau bersepakat tentang yang (b) sebelum (a)-nya di kerjakan dengan hasil yang agak jelas.

Main Cap-Capan

T: Bagaimana mula kejadian kontradiksi ini: Ada ketakutan, kengerian dan kebencian, lalu hancurkan bahkan kuburkan Komunis Indonesia dengan banjir darah yang justru mengalir dari si komunis dan yang dikomuniskan itu. Lalu bangkitlah stigma atau "main cap-capan" yang mengharuskan orang memiliki surat bersih lingkungan dan tidak terlibat sebagai syarat *n glamar* kerja maupun *ngelanjutin* sekolah. Sampai mau sekolah ke luar negeri juga harus lulus litsus kan. Bagaimana ini?

J: Wah susah ini jawabnya. Kalau dirunut "asal-mula"nya mungkin ya sudah ada sejak awal mula sejarah manusia. *Gue* tetap percaya bahwa apa yang sejak tadi kita obrolkan itu *nggak unik* Indonesia. Semua itu bisa terjadi dengan atau tanpa ada PKI: dengan PKI sebagai korban atau pelaku kekerasan. Bukannya *gue* pengin membenarkan yang *satu* atau meremehkan yang lain, tapi kalau terlalu terpukau pada kasus yang empirik, kayaknya kita akan menembakkannya pelor kesasar. Coba lihat bagaimana menjelaskan kekerasan yang terjadi di Kalimantan Barat [antara akhir 1996 dan awal 1997]? Atau rame-rame anti-Cina sebelum tahun 1980-an? Atau yang dari hari ke hari menimpa sekian juta anak-anak dan perempuan di dalam rumah tangga sendiri tanpa ada pemberitaan besar-besaran seperti yang terjadi pada kekerasan di ruang publik?

Bukannya berarti kasus yang empirik dan detailnya *nggak* penting. Persoalannya begitu kompleks. Kita hanya bisa membuat kerangka persoalan yang terbatas untuk sebuah perbincangan (*discourse*). Dan setiap kerangka perbincangan mensyaratkan seleksi mana soal yang relevan atau signifikan dan mana yang tidak atau kurang relevan.

T: Uraian *ente* tadi nyinggung sikap pejabat yang nurut saja karena harus mengamankan kedudukannya. Tapi *gimana dengan* orang lain, macam politikus, kaum ulama, ilmuwan sosial, aktivis, dan lain-lain? Tentu ada perorangan atau kelompok kecil yang *nggak nrimo* kan. Tapi mengapa kok sepetinya semua *nrimo* ketentuan itu tanpa banyak cincong? Seolah-olah masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke *nrimo* pendirian pemerintahan Orba, "Ideologi itu kayak

penyakit TBC. Kalau *bokapnya* kena, ya bini, ya anak, ya seluruh, keluarga sampai tetangganya juga pasti kejangkitan." Lalu soal "bersih diri" dan "bersih lingkungan" itu tadi, ya jadi soal biasa saja.

J: *Nggak* betul kalau dibikin perbedaan kontras antara prajurit atau birokrat negara dengan ilmuwan, seniman, aktivis, atau ulama. Seringkali mereka susah dibedakan. Juga *nggak* betul kalau dibilang semua orang cuma *nrimo*. Dari saat ke saat muncul pertanyaan, gugatan, umpanan, atau subversi dengan aneka variasi dan aneka hasil menurut sejumlah kondisi. Tergantung banyak hal: sebelum atau sesudah Perang Dingin, koneksi yang bersangkutan, risiko yang *nggak* selalu sama, kadar keberanian atau kenekidan, dan sebagainya. Lihat kasus UKSW tadi. Ada saatnya militer sampai lembaga swasta melindungi orang yang dituduh secara sembarangan sebagai "terlibat G-30-S/PKI." Ada saatnya orang-orang pada kedudukan yang sama menendang si tertuduh.

Teror Negara

T: Kami tahu *ente* berminat pada studi tentang "teror negara." Apa bedanya teror oleh negara dengan teror para bandit atau rampok dan preman?

J: Yang pertama punya atau dianggap punya kewenangan legal dan monopolistik untuk mengaduk-aduk nasib penduduk di dalam wilayah kekuasaannya. Kalau yang kedua dianggap tak punya wewenang itu, jadi tindakannya dibilang sebagai kriminal. Beda yang lain, yang pertama sering menampilkan

diri sebagai korban terorisme, dan hampir-hampir tidak pernah dituduh sebagai bandar terorisme. Sedang yang kedua hampir selalu tampil secara jujur sebagai bandit, rampok, dan preman.

T: Apa yang baru, yang belum pernah *diomongin* orang lain mengenai topik "teror oleh negara" ini?

J: Setahu saya topik itu masih serba baru dalam sebuah diskusi teoretik yang serius untuk ilmuwan sosial, sebab juga serba mentah bagi kita. Padahal kekerasan politik dan teror negara terjadi di mana-mana. Yang rajin mencatat (tanpa beban analisa) adalah wartawan dan lembaga hak asasi manusia. Mungkin juga seniman. Lingkungan ilmu-ilmu sosial sangat ketinggalan memahami gejala itu lebih jauh daripada sekadar data empirik. Katakanlah pendalaman teoretik. Bukannya belum pernah ada yang mencoba. Tapi semua usaha di masa lampau itu kurang mendapat sambutan serius.

T: Apakah teror seperti itu pernah terjadi dalam sejarah modern Indonesia sebelum Orba?

J: Kayaknya universal. Di mana pun, kapan pun. Cuma iramanya berbeda-beda. Ledakannya berbeda-beda. Ada dua hal yang menurut *gue* perlu dibedakan dan disadari kaitannya. Pertama adalah "kekerasan politik yang dilakukan negara." Ini bergerak pada tingkat material atau jasmaniah. Kedua, "teror politik oleh negara." Supaya bisa berhasil yang kedua sangat bergantung pada yang pertama, dan mungkin juga sebaliknya. Tapi yang kedua tidak banyak berlangsung

secara kasat-mata. Gejalanya bisa kelihatan sedikit-sedikit di permukaan. Tapi yang kelihatan itu cuma ujung-ujungnya saja.

Contohnya begini: sampai sekarang banyak dari peristiwa tahun 1965 yang masih mengganggu dan membentuk pikiran, hati, batin, mimpi, serta gosip orang Indonesia. Tapi sangat sedikit yang dikeluarkan dan dibahas secara mendalam. Hambatannya bukan semata-mata karena ada sensor dan larangan resmi dari pemerintah. Salah kalau kalian pikir begitu. Hambatannya banyak dan kompleks.

Kebanyakan orangtua yang sedikit banyak kenal kekerasan tahun 1965 itu memilih untuk tidak membicarakan apa yang disaksikannya atau didengarnya dari zaman itu dengan anak-anaknya sendiri. Bahkan bila anak-anak itu meminta, orangtuanya bicara di kamar tertutup. Ini sebagian dari sosok perwujudan teror dan trauma. Tapi bagaimana *silence* dan *absence* dapat dibahas dan dianalisis dengan alat-alat ilmiah yang kita pelajari dari sekolah? Kan susah!

Biasanya setiap masyarakat punya beban sejarah kekerasan seperti itu. Seperti halnya setiap keluarga punya rahasia "pengalaman masa lampau" yang menimpa salah seorang anggota keluarga yang terlalu mengerikan atau memalukan untuk dibahas dan diingat. Tapi juga sulit dilupakan. Hanya orang-orang seperti tokoh Minke [dalam novel-novel karya Pulau Buru] atau Pramoedya yang mungkin berani membongkar "rahasia" keluarga seperti itu. Jumlahnya sangat amat sedikit.

T: Apakah teror *gituan* juga pernah dipakai di zaman rezim kolonial Belanda ataupun rezim tentara pendudukan Jepang?

J: *Gue nggak* punya detail ceritanya. Tapi gue yakin gejala teror juga berlangsung di zaman-zaman itu. Bahkan sebelum kolonial Eropa tiba. Tapi salah kalau "teror" dipahami sebagai semacam "alat" yang sewaktu-waktu bisa "dipakai" oleh oknum jahat seperti yang kalian rumuskan dalam pertanyaan di atas. Kalian terlalu rasional-instrumental.

T: Beberapa waktu yang lalu kami mewawancara Clifford Geertz*. Tentang tahun 1965, antara lain, pokok pikirannya adalah—ini saduran bebas saja—"Harus memahami kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat." Dalam perihal banjir darah tahun 1965, *gimana* kita memahami hubungan antara kekuatan yang ada dalam masyarakat dan kekuatan negara? Kekuatan dalam masyarakat, misalnya ikatan karena hubungan darah, agama, kesukuan, kedaerahan, dan sebagainya, yang oleh Geertz disebut ikatan primordial. Sedangkan kekuatan negara, misalnya pengiriman RPKAD [Resimen Para Komando Angkatan Darat] ke Jateng, Jatim, dan Bali, pemakaian media yang dikontrol, ketidakbecusan dalam mengurus ekonomi, sebagaimana pernah disebut Ben Anderson dalam menjelaskan banjir darah 1965.

J: *Sorry gue* terlalu mentah dan bego untuk bisa menjawab pertanyaan kalian yang cemerlang. *Gue nggak* tahu jawabnya. Kayaknya sih pandangan dua gurubesar yang kalian sebut-sebut itu ada benarnya, biarpun membelah persoalan menjadil

*Lihat "Awas Buaya!: Clifford Geertz tentang Keberagaman Masyarakat Indonesia," dalam F.X. Baskara T. Wardaya (editor), *Mencari Demokrasi*. Jakarta: ISAI, 1999, 51–94.

dua (masyarakat/negara) itu juga bermasalah. Ada baiknya kita *nggak* terlalu terpukau oleh gurubesar mana pun. Yang mencurigakan dari analisa-analisa mereka itu adalah "kelewat rasional". Ini bisa dipahami karena mereka cari makan di bawah tirani rasionalitas dan kompetisi karier yang mengerikan.

Biarpun sering memukau, *nggak* berarti kesimpulan dan pendapat mereka itu tepat. Ini bukan mengejek individu gurubesar. Ini kecurigaan yang pantas dilancarkan kepada semua orang yang terlalu lama di kampus. Sikap kritislah. Peristiwa yang *nggak* rasional juga akan dicari-cari rasionalitasnya. Kerja para gurubesar *nggak* sama persis, tapi juga *nggak* sangat berbeda dari polisi, intel militer, atau jaksa yang cari makan dengan mencari PKI. Kalau PKI-nya *nggak* ada, ya diada-adakan.

Batuk-Batuk Pagi

T: *Gimana* pengaruh pada segala yang berlaku sekarang di Jerman Timur, Eropa Timur serta Uni Soviet, RRC dan Vietnam? Apakah tidak ada keyakinan baru bahwa komunis telah bangkrut? Toh kita liat ASEAN [Association of Southeast Asian Nations] nimbrung di Indocina.

J: Jelas dong. Sejumlah polling mendukung pengertian umum bahwa Perang Dingin sudah lewat. Tapi bukan berarti seluruh masa Perang Dingin sudah lenyap. Maka di Indonesia, bahkan di seluruh Asia Tenggara, terjadi festival kebingungan. Yang paling lucu: sementara gaya kepemimpinan

Orde Baru di tahun 1970-an sudah makin sempoyongan memasuki masa pasca-Perang Dingin, SLORC [State Law and Order Restoration Council] di Burma sekarang malah pengin meniru.

T: Di awal obrolan ini *ente* mengamati kedatangan generasi baru yang masih *seger*. Mereka "punya mimpi dan gejolak kejiwaan tersendiri," yang beda dengan generasi sebelumnya yang sudah punya fantasi atau horor macem-mecem tentang "Hikayat G-30-S/PKI." Tapi di salah satu kampus besar di Amerika, kalau *nggak* salah di Boulder, Colorado, ada kata-kata ini, "*Who knows only his own generation will always remain a child.*" Kalau generasi baru yang *ente* amati itu hanya tahu "Nintendo, Iwan Fals atau Liga Dunhill," mereka pasti akan terbatas. Sama terbatasnya dengan anak-anak. *Gimana komentar ente?*

J: Ya, *bener*. Tapi perlu ditambahi dua peringatan. Pertama, jangan sepelekan mitos-mitos kontemporer itu. Jangan bilang mereka itu "hanya." Sebelum 1993, Megawati juga dibilang "hanya". Sebelum 1965, Soeharto juga mungkin dianggap "hanya". Sebaliknya jangan terburu-buru terpukau oleh anak muda atau orangtua yang mengacungkan tinju ke udara sambil teriak "Das Kapital", "Jihad", atau "Demokrasi". Di pasar-pasar di Jawa, poster Saddam Husein dijual berdampingan sama poster Sukarno, Megawati, Iwan Fals, dan Ida Iasha. Konon di RRC poster Mao bergandengan dengan poster Maddona. Mana yang "hanya", mana yang "bahkan"?

Kedua, kita baru *ngeliat* anak-anak papi/mami yang baru *aja* belajar keluar rumah lalu coba-coba. Sabar donk. Kita

liat aja sepuluh atau dua puluh tahun lagi. *Nggak* adajaminan mereka akan lebih progresif ketimbang generasi terdahulu dalam memberikan sumbangan untuk masyarakatnya. Tapi minimal ada alasan untuk berharap sesuatu yang "lain" dari mereka. Mereka tak punya beban kayak papi-mami mereka. Dulu aku duga yang mabuk mitos-mitos Nintendo dan Sailor Moon itu cuma anak papi/mami kaya. Ternyata *enggak tuh*. Sampai di kampung-kampung kumuh pun, fantasi anak-anak itu banyak samanya. Generasi PRD kayaknya merupakan awal kokok ayam di ufuk fajar. Kalau bukan kokok ya batuk-batuk pagi begitulah.

T: Apakah "Generasi Iwan Fals" ini *nggak ngadepin* soal teror oleh negara itu juga?

J: Makin lama Orde Baru makin mengalami keloyoan. Juga dalam soal teror. Tapi *temen-temen* PRD, simpatisan mereka, simpatisan PDI yang cuma nonton-nonton mimbar bebas PDI, simpatisan SBSI [Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia], dan simpatisan Timor-Timur, simpatisan KIPP [Komite Independen untuk Pengawasan Pemilu] di berbagai penjuru tanah air bisa menjawab pertanyaan ini lebih baik. Mereka banyak yang belum berusia duapuluh.

T: Setelah Peristiwa 27 Juli 1996 anak-anak PRD dibilang sebagai "metamorfosa PKI" dan Budiman Sujatmiko dituduh "Anak PKI." Tapi kami baca di koran-koran, orangtuanya *nggak* ketakutan lagi seperti orang lain dalam kasus serupa di kota lain. Malahan *bokap* Budiman bilang di depan pers bahwa tuduhan Jenderal Syarwan Hamid bahwa dia PKI itu

sama sekali *nggak bener*. Orangtua anak-anak PRD lainnya juga *nggak* terus ketakutan mendengar tuduhan itu. Mereka muncul, nengok anak-anaknya di bui, kasih komentar di koran, dan sebagainya.

Menurut *ente* apakah ini bisa kejadian akibat melemahnya teror negara itu? Atau menunjukkan gejala lain?

J: Soal melemahnya teror memang ya. Tapi *nggak bener* kalau kasus *bokap* Budiman dianggap yang pertama kali dan sangat berbeda dari yang terjadi sebelumnya. *Bokap* dan *nyokap* Budiman pada awalnya grogi juga. Tapi kemudian perlahan-lahan semangat dan keberanian mereka bangkit. Hal yang sama terjadi di sejumlah kasus lain di luar Jakarta sejak awal tahun 1990-an.

T: Kalau diringkas, apa akibat atau tanggungan masa sekarang atas banjir darah 1965?

J: Imajinasi, kecurigaan, ketakutan, nafsu, daya jangkau gerak-gerik kita masih berkubang di zaman Perang Dingin itu. Atau kebingungan memasuki pasca-Perang Dingin.

T: Dan apa pentingnya mempelajari soal ini?

J: Tanpa mempelajari soal itu, sulit sekali menjelaskan rahasia awetnya pemerintahan Orde Baru—salah satu rezim paling awet di dunia, mungkin yang terawet kedua di dunia. Tanpa mempelajari soal itu, sulit sekali menjelaskan watak, keistimewaan, dan kelemahan “oposisi” yang diproduksikan oleh masyarakat dan era Orde Baru. Tanpa memahami rahasia ke-

awetan Orde Baru, kita *nggak bisa ngerti* proses penuaan dan keruntuhannya, atau peluang-peluang sesudahnya: sebuah masa pasca-Orde Baru. Bukan sekadar suksesi kepresidenan seperti yang biasanya rame dibicarakan.